



06 JANUARI 2023

Laporan PKM

SUKAMAHI, KEC. CIKARANG PUSAT,
KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT 17530



**Strategi Peningkatan Kualitas
Tata Kelola Pemerintahan:
Manajemen Risiko dan Sistem
Pengendalian Intern di
Kecamatan Kabupaten Bekasi**

**Program Studi
Magister Manajemen
Universitas Kristen
Indonesia**

LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
*Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko
dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi*



**Pemerintah Kabupaten Bekasi Inspektorat Daerah Komplek Perkantoran
Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat**

Oleh :

Dr. M. L. Denny Tewu, SE., MM

Khirsna Kusumo Pambudhi (Mahasiswa)

Immanuel Simon Loblobly (Mahasiswa)

Robert Andreas Sinaga (Mahasiswa)

Sri Bintang Elisabet (Mahasiswa)

Nelly Gustiana Istita (Mahasiswa)

Cornelia Adriana Hukom (Mahasiswa)

PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2023

LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pemerintah Kabupaten Bekasi Inspektorat Daerah Komplek Perkantoran
Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
04 Januari 2023

Seiring dengan upaya peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan Kabupaten Bekasi, Inspektorat Daerah yang berlokasi di Komplek Perkantoran Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, telah melaksanakan berbagai inisiatif pada tanggal 04 Januari 2023. Dalam laporan ini, kami menyajikan informasi komprehensif mengenai langkah-langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan sumber daya di tingkat daerah. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk memastikan efektivitas organisasi pemerintah daerah dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Kabupaten Bekasi secara keseluruhan. Langkah-langkah ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja internal, tetapi juga pada penguatan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, menciptakan dasar yang kokoh untuk kemajuan berkelanjutan di masa depan.

Susunan Acara	Keterangan
Kegiatan Tujuan	Memperluas dan mengembangkan pemahaman atau ilmu dalam bidang Manajemen Risiko.
Agenda	<ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan2. Doa3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya4. Kata Sambutan :<ol style="list-style-type: none">a. Dr. H. Sutisna, M.M., CGCAE – Plt Inspektur Daerahb. Hj. Agustini Sri Wahyuni, M.Pd – Sekretaris Inspektoratc. Dr. M. L. Denny Tewu, SE., MM– Kaprodi MM UKI5. Acara Inti (Presentasi Materi) dan Pre-test6. Post-test7. Penutupan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan salah satu Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya dalam melakukan terobosan mengikuti perkembangan zaman dan berinovasi secara terus-menerus dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Seiring perkembangan Kabupaten Bekasi yang terus membangun untuk mewujudkan tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi di antaranya :

1. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah; dan
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan Tujuan daerah yang salah satunya adalah peningkatan perekonomian daerah dijawantahkan dengan ditetapkannya salah satu sasaran daerah yakni meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Strategi yang ditetapkan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan adalah salah satunya melalui peningkatan Maturitas (kematangan) Penyelenggaraan SPIP oleh Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat guna mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. *Good governance* yang efektif membutuhkan keselarasan yang baik dengan pencapaian integritas, profesionalisme, etos kerja serta moral yang tinggi. Pentingnya penerapan prinsip *good governance* sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut mampu meningkatkan kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan memenuhi nilai-nilai integritas. Intisari dari *good governance* adalah terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien serta akuntabel dalam melayani masyarakat.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah melalui prinsip *good governance* pada salah satu Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal ini dapat dituangkan dalam bentuk tulisan artikel yang berjudul “Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi”.

Mengingat luasnya aspek peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan keterbatasan penulis untuk memahami seluruh aspek peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis membatasi lingkup pembahasan mengenai permasalahan tata kelola pemerintahan di antaranya mengenai implementasi manajemen risiko dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

1.2 Permasalahan Mitra

Rencana kegiatan PKM ini akan dilaksanakan secara tatap muka yang berlokasi di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan salah satu Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di Utara, Kabupaten Bogor di Selatan, Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi di Barat dan Kabupaten Karawang di Timur. Dari data yang diperoleh, kondisi eksisting penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kabupaten Bekasi belum mencapai level 3 yakni pengendalian satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah telah terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan salah satunya adalah mengenai pemenuhan unsur penilaian risiko yakni implementasi manajemen risiko yang belum berjalan secara optimal.

BAB II

PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah terkait dengan implementasi dari manajemen risiko yang menjadi mandat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang berbunyi “Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko”. Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif, tentunya diperlukan pemahaman secara komprehensif. Pemahaman yang komprehensif ini diperlukan oleh perangkat daerah yang mendukung penerapan manajemen risiko agar penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah berjalan secara efektif dalam mendukung tercapainya kinerja perangkat daerah yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan daerah.

Kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Bekasi mendapat Predikat Level 2 untuk Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Target Kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah Level 3 yakni pengendalian satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah telah terdokumentasi dengan baik. Area Perbaikan yang memerlukan banyak perbaikan yang harus ditindaklanjuti adalah mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko belum secara menyeluruh dipahami oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Bekasi khususnya Kecamatan. Sosialisasi dan Pelatihan telah dilaksanakan pada Tahun 2023 baru hanya pada Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas/Badan belum menyentuh pada Kecamatan.

2.2 Solusi Permasalahan

Penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini berfokus pada Perangkat Daerah khususnya Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. PKM diselenggarakan dengan pemberian materi dan simulasi mengenai penyusunan register risiko sampai dengan rencana tindak mitigasi yang diperlukan kepada peserta, dalam hal ini pejabat struktural Kecamatan. Kecamatan, dalam hal ini sebagai peserta pada kegiatan ini, diharapkan mendapatkan pemahaman secara komprehensif terkait dengan implementasi manajemen risiko dengan tujuan agar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berjalan secara efektif di lingkungan Kecamatan Bekasi.

Implikasi dari solusi permasalahan yang ditawarkan diharapkan hasil dari PKM ini menjadi bentuk inisiasi bagi Kecamatan untuk tidak hanya memahami substansi dari manajemen risiko tetapi juga ke depannya mengimplementasikan manajemen risiko secara kontinu khususnya dalam menangani risiko yang dihadapi oleh Kecamatan untuk memberi kontribusi dalam Pembangunan Daerah melalui perbaikan layanan kepada masyarakat oleh Kecamatan sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi. Metode pemecahan masalah yang ditawarkan dijabarkan dalam Bab III pada Laporan Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Persoalan yang dihadapi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

Berdasarkan uraian permasalahan pada Bab II, Tim Pengabdian kepada Masyarakat berupaya merumuskan metode yang tepat untuk penyelenggaraan PKM dalam menangani persoalan yang dihadapi yakni belum optimalnya penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang disebabkan oleh belum berjalannya implementasi manajemen risiko. Pasalnya, implementasi manajemen risiko tidak hanya diperlukan diperlukan untuk diimplementasikan oleh sebagian perangkat daerah tetapi juga menjadi aktivitas yang wajib dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menjadi lingkup pemerintah daerah berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

3.2 Persoalan yang ingin diselesaikan melalui Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ditujukan untuk menangani persoalan sebagaimana telah diuraikan di atas dengan memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta, dalam hal ini Kecamatan, dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif di lingkungan Kecamatan di Kabupaten Bekasi dengan hasil yang diharapkan peserta mampu :

1. Memahami konsep manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah;
2. Memahami keterkaitan implementasi manajemen risiko terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
3. Menyusun register risiko sesuai dengan konteks yang ditetapkan berdasarkan karakteristik lingkungan pengendalian;
4. Menyusun peta risiko berdasarkan hasil identifikasi risiko, penilaian risiko dan analisis risiko yang telah dilakukan;
5. Merumuskan rencana tindak pengendalian yang akan diterapkan;
6. Menjadikan dokumen manajemen risiko sebagai pedoman dalam merumuskan aktivitas yang akan dijalankan.

3.3 Metode pendekatan yang dilakukan

Metode yang dilakukan dalam memecahkan permasalahan ini adalah dengan melakukan beberapa metode. Metode yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Metode Ceramah

Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan teori-teori dan konsep dasar yang harus dimiliki dalam menerapkan manajemen risiko dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah. Sehingga, peserta, dalam hal ini Kecamatan,

dapat memahami bagaimana manajemen risiko seharusnya dijalankan dan implikasinya terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

b. Metode Demonstrasi

Metode ini dilakukan sebagai tahap pelatihan pada kegiatan ini. Dengan adanya demonstrasi/simulasi secara nyata oleh tim PKM dengan tujuan agar peserta dapat mengamati secara nyata dan mengerti teknik yang dibutuhkan dalam menyusun manajemen risiko. Metode demonstrasi ini dilakukan dengan memberikan contoh penyusunan manajemen risiko sebelum dilakukan metode berikutnya yaitu latihan/simulasi yang dilakukan oleh setiap peserta.

c. Metode Latihan/Praktik

Metode Latihan/Praktik dilakukan untuk memberikan pemahaman secara langsung dengan cara menyusun manajemen risiko di lokasi penyelenggaraan PKM. Metode ini dimaksudkan sebagai bentuk aktualisasi dari teori dan konsep dasar yang telah disampaikan, serta demonstrasi yang telah ditunjukkan kepada peserta.

3.4 Prosedur Kerja

Penyelenggaraan PKM ini dilaksanakan dengan kerja sama antara Universitas Kristen Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi. PKM akan dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Januari 2024, Pukul 08.30 WIB – selesai secara luring di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

3.5 Rencana Kegiatan

- a. Memberikan pemahaman teori dan konsep dasar manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- b. Melakukan demonstrasi penyusunan manajemen risiko;
- c. Melaksanakan pendampingan penyusunan manajemen risiko melalui latihan/praktik langsung oleh Peserta;
- d. Membuka ruang konsultasi terhadap implementasi manajemen risiko;
- e. Melakukan pengukuran terhadap pemahaman peserta terhadap manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah dengan memberikan *pre-test* dan *post test* kepada peserta.

3.6 Partisipasi Mitra

Partisipasi mitra dalam mendukung PKM ini adalah dengan menyediakan tempat untuk menyelenggarakan PKM dan mengundang Kecamatan sebagai peserta pada agenda PKM yang diselenggarakan. Mitra mengundang Sekretaris Kecamatan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan.

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN

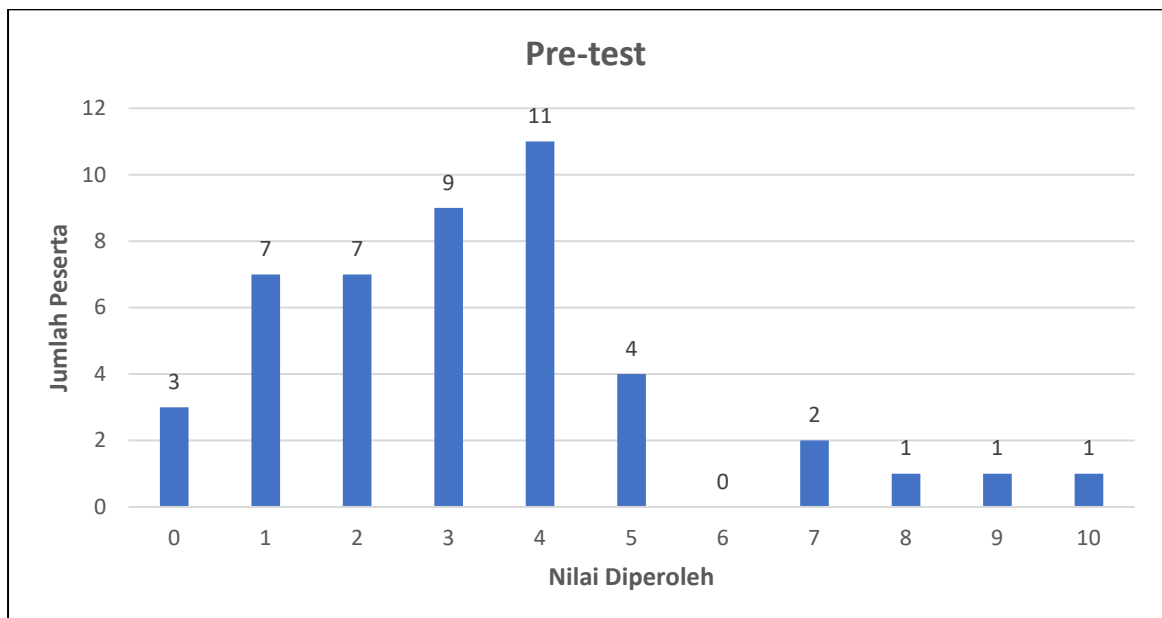
4.1 Peserta Undangan

Target peserta adalah perwakilan dari 23 (dua puluh tiga) Kecamatan di Kabupaten Bekasi dengan turut mengundang Sekretaris Kecamatan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan, hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan peran Sekretaris Kecamatan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan dalam mengoordinasikan hasil dari Pelatihan Manajemen Risiko dan SPIP di Kecamatan. Berdasarkan daftar hadir terdapat 74 orang Peserta dan turut dihadiri oleh Inspektur Daerah, Sekretaris Inspektorat dan salah satu mahasiswa yang juga merupakan Auditor di Inspektorat Daerah pada Acara Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 2 Inspektorat Daerah sebagai berikut :

1. Kecamatan sebanyak 67 orang perwakilan dari 23 Kecamatan; dan
2. Mahasiswa UKI sebanyak 7 orang

4.2 Hasil Pretest

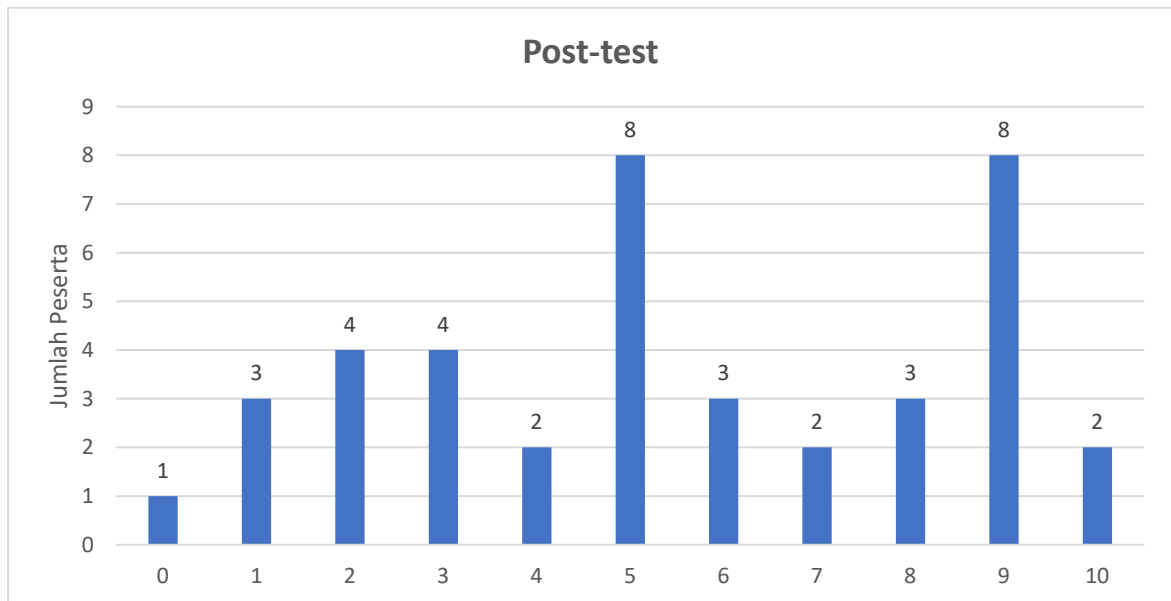
Pre-test dilakukan untuk mengetahui gambaran awal Pemahaman Peserta terhadap Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi dengan memberikan 10 soal mengenai Manajemen Risiko dan SPIP. Adapun hasil pre-test dengan total nilai sebesar 153 dari 46 yang mengikuti pre-test secara rata-rata mendapat Skor sebesar **3,33 dari 10** dengan rincian hasil pre-test sebagai berikut :



4.3 Hasil Post-Test

Post-test dilakukan untuk mengetahui adanya peningkatan Pemahaman Peserta terhadap Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi” dengan memberikan 10 soal mengenai Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi. Adapun hasil post-test dengan total nilai sebesar 219 dari 40 yang mengikuti post-test secara rata-rata mendapat Skor sebesar **5,47 dari 10** dengan rincian hasil post-test sebagai berikut :



4.4 Pemberian Sertifikat

Sertifikat diberikan kepada Peserta dan Narasumber sebagai bentuk apresiasi dalam membantu terselenggaranya pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Tema “Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi” yang diselenggarakan di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi Ruang Rapat Inspektorat Daerah Lantai 2 dengan contoh sebagai berikut :

Sertifikat Narasumber



Sertifikat Peserta



4.5 Dukungan Mitra pada Saat Pelaksanaan

Penyelenggaraan Kegiatan ini didukung penuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Mitra Utama dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Tema “Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi” dan PT Klase Auto Rental (KAR) sebagai Mitra Pendukung yang secara penuh membantu Tim dalam pendanaan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengabdian kepada Masyarakat dengan Tema “Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi” telah berhasil diselenggarakan di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dihadiri oleh 67 orang Peserta yang merupakan perwakilan dari 23 Kecamatan dengan diwakili oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Pegawai dari Kecamatan;
2. PkM yang diselenggarakan meliputi Pre-test, Pemberian Materi Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi, Post Test dan Pemberian Sertifikat Elektronik kepada Peserta;
3. Terdapat peningkatan pemahaman oleh peserta yang hadir dengan ditunjukkan rata-rata pre-test dan post-test yang meningkat dari semula 3,33 menjadi 5,47;
4. PkM ini merupakan kontribusi semua pihak meliputi Tim PkM UKI sebagai pengusul PkM, Inspektorat Daerah sebagai Mitra Utama dan PT Klase Auto Rental (KAR) sebagai Mitra Pendukung.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat kami sampaikan untuk masing-masing pihak sebagai berikut :

1. Universitas Kristen Indonesia

- Memperbanyak program yang melibatkan mahasiswa untuk berkontribusi dan berperan serta terhadap masyarakat;
- Mengusulkan lebih banyak tema Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi fokus mahasiswa;
- Mendukung penuh mahasiswa dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Pemerintah Kabupaten Bekasi

Pengabdian kepada Masyarakat hanya sebagai bentuk inisiasi, agar dapat dilakukan pendampingan lebih lanjut kepada Perangkat Daerah khususnya Kecamatan untuk mengimplementasikan Manajemen Risiko dalam mendukung peningkatan maturitas SPIP Terintegrasi di Kabupaten Bekasi.

3. Mahasiswa UKI

PkM hanya sebagai salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan *soft skill* yang di masa mendatang diperlukan khususnya tentang bagaimana bekerja sama dan membangun tim secara solid untuk mencapai tujuan organisasi.

Jakarta, Januari 2023


Dr. M. L. Denny Tewu, MM



Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana

SURAT TUGAS

Nomor: 0140/UKI.MM/PPM.01/2023

Sehubungan dengan surat dari Ka.Prodi Magister Manajemen Nomor: 0139/UKI.MM/PPM.01/2023 Perihal permohonan Surat Tugas/Surat Edaran/ Surat Keterangan/Pengumuman/ DLL Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Prodi MM, yang berkaitan dengan kewajiban Universitas Kristen Indonesia (UKI) untuk melaksanakan Tri Dharma di Kabupaten Bekasi. maka melalui surat ini Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia dengan ini menugaskan nama-nama di bawah ini:

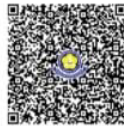
Ketua : **Dr. M. L. Denny Tewu, MM**
Anggota : **Khirsna Kusumo Pambudhi / 2204190038 (Mahasiswa)**
Immanuel Simon Loblobly / 2204190035 (Mahasiswa)
Robert Andreas Sinaga / 2204190042 (Mahasiswa)
Sri Bintang Elisabet / 2204190039 (Mahasiswa)
Nelly Gustiana Istita / 2204190046 (Mahasiswa)
Cornelia Adriana Hukom/2204190048 (Mahasiswa)

Mengikuti Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Prodi Magister Manajemen Program Pascasarjana UKI dengan tema : **Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi** pada tanggal **06 Januari 2023**.

Demikian Surat tugas ini kami buat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 03 Januari 2023

Ketua Program Studi Magister Manajemen,



Dr. M.L. Denny Tewu, S.E., M.M.

Tembusan :

1. Wakil Direktur Program Pascasarjana

• RENDAH HATI • BERBAGI DAN PEDULI • PROFESIONAL • DISIPLIN • BERTANGGUNG JAWAB • BERINTEGRITAS

Jl. Mayjen Sutoyo no.2 Cawang - Jakarta 13630 INDONESIA Telp. 021.8092425, 8009190
E-mail: pascasarjana-uki@uki.ac.id Website: <http://pascasarjana.uki.ac.id>

Jl. Mayjen Sutoyo no.2 Cawang - Jakarta 13630 INDONESIA Telp. 021.8092425, 8009190
E-mail: pascasarjana-uki@uki.ac.id Website: <http://pascasarjana.uki.ac.id>

Dokumentasi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat “Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko Dan Sistem Pengendalian Intern Di Kecamatan Kabupaten Bekasi”









ABSENSI PKM DI PEMDA

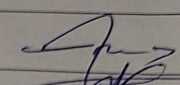
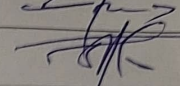
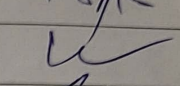
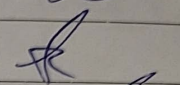
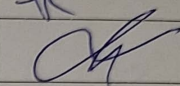
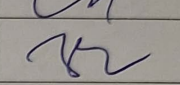
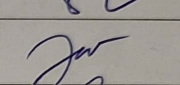
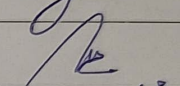
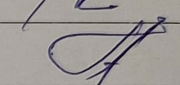
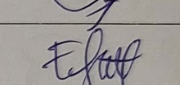
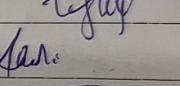
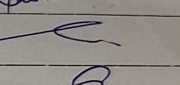
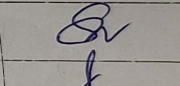
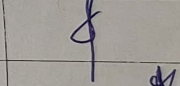
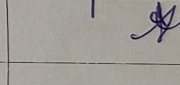
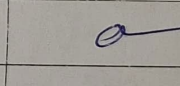
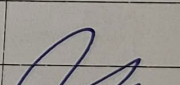
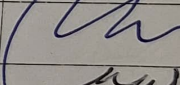
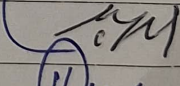
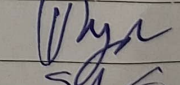
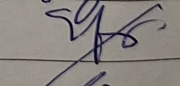
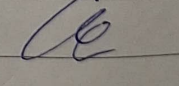
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7MldZ63eK7dTmuU_fHcspi0sCBn_23To1_SmqnHoyOOQS6A/viewform?usp=sf_link



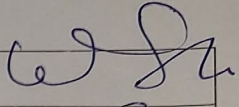
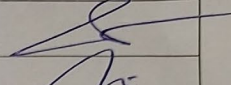
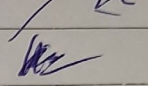


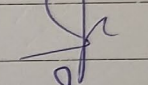
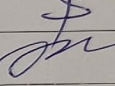
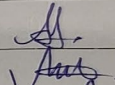
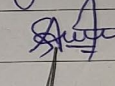
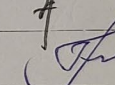
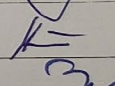
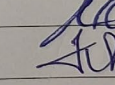
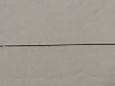
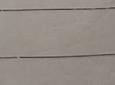
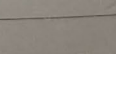



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal	Kamis, 4 Januari 2023
Waktu	09:00-12:00
Tempat	Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi Lantai II
Peserta	TIM Implementasi SPIP Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Dosen dan Mahasiswa UKI
Agenda	PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA "STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN: MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI PERANGKAT DAERAH DAN KECAMATAN BEKASI"

No.	Nama	Kecamatan/Jabatan/Email	Tanda Tangan
1	FAISAL.K	Setu / Kesatuan / faisal.paid@gmail.com	
2	SAPTO H	Bojongsari / Reccom	
3	E. Damiri	Sekcam Setu	
4	CORNEIA HUKOM	Mahasiswa	
5	Sri Bintang E	Mahasiswa	
6	RUMINTA	MAHARAJAWA	
7	Berli Haryanti	Sekcam Karang Bahagia	
8	Nelly Eustiana Istia	Mahasiswa	
9	Robert Andrew S.	Manajemen	
10	Immanuel lobloby	mahasiswa	
11	Am. Staleh.	Kec. Sukakarya	

12	SUTI SUHENDAH	Kec. Awar Gembong	
13	Kwan S.	kec. Tamsal	
14	Rajih A	kec. Sukosari	
15	Tiger R	"	
16	Isrujor	Kec Babelan	
17	TRI-H	- " -	
18	Ade Sanid	Kec. Cikarang Selatan	
19	Amud	Celene	
20	PERON	Kec. Bojongsari	
21	Ethi Munawaroh	Kec. Bojongsari	
22	Ali Zaki	kec. Tanjaya	
23	Alva N.R.	"	
24	Serwahyuni	Kec. Serang Baru	
25	Mirawan	"	
26	Mawut	Kec. Cikarang Pusat	
27	Cecep Agus	Kec. Cileber	
28	ABDUL HAY	kec Cileber	
29	AJO	kec. Tarumanegara	
30	ANWAR F	kec - Cikwit	
31	Kusnans Rshim	Kec. Munasir	
32	Tina Karini	Kec. PeBaxRai	
33	Abdul hay	Kec. Cikarang Barat	

34	Jamaludin	Cibang Utara	
35	Andi Lukman	Cibang Pungin	
36	DADI SETIADI	SUKAWANGI	
37	MERY	— " —	
38	Uday Burianan	Sekom Cik Sel	
39	Selolier	Sekel Kec. Cik - Pupal	
40	Fachrud Pogi	Sulekanya	
41	Tri - M	Grup Ka. FRB	
42	Selstyo	Sulekanya	
43	Munir M.	PH. Subbag. Perenc. Citra	
44	Dini Mkmahillah	Azf Cikarang Timur	
45	Dwi. L	— " —	
46	Yudi	— " —	
47	A. Ruslanula	ke. Karang Kelapa	
48	Samar Hrd.	kec. Cibinjal	
49	Nana. S. sos	"	
50	Aripin Suryana	kec. Cibarusah	
51	Adi Sumardi	kec. Kadungwarung	
52	Anita	kec - Tarumanaga	
53	Edi Gumala	ke. Cibin	
54	Hautadi	kec. Cibitung	
55	Tia Ferdiansyah	kec. Cibitung	

56	Wanlis	kec. Tamsel	
57	Pray.	ke. Cabang Tinggi	
58	Rita Merryanti	Kec. Cibarang Utara	
59	Rizki pratama	kec. TANJA UTARA	
60	Ayu.	KEC. TAMBUN UTARA	
61	ENCIM-M	-	
62	Nisa	kec. Cibin	
63	Novi	kec. Cibin	
64	Linda	kec. Tamsel	
65	Surya	kec. Tamsel	
66	Anti	kec. Satu	
67	Petra	kec. Satu	
68	Sarmila	kec. Tambelong	
69	Dangy	kec. Tambelong	
70	Selvi	Pebayuran	
71	Ismi gemondar	kec. Makasar	
72	Indah K	Kecamatan Serang Baru	
73	KHRISNA KUSUMO P	Mahasiswa UEL (inspektorat)	
74			
75			
76			
77			